



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
- 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

3. Perencanaan...

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

15. Rencana ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

15. Rencana Kerja Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrengbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data Pembangunan Daerah;
18. Daerah adalah Kabupaten Ende;
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
20. Bupati adalah Bupati Ende;
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
23. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende;
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
25. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ende

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pertanian baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas adalah:
- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pertanian yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas Pertanian.
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Pertanian di Kabupaten Ende;
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Pertanian mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

d. bab IV ...

- d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil Aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Dinas kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas hasil verifikasi Kepala Dinas diajukan ke Bagian Hukum untuk proses Penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9 ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan / atau kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra Dinas.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

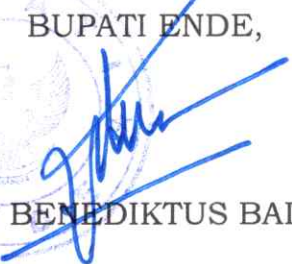
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (berita daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 No.56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

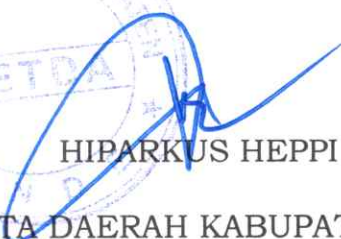
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


HIPARKUS HEPPI
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 48

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Pertanian	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN KAB. ENDE TAHUN 2025 - 2029



Selamat

BUPATI ENDE
YOSEF BENEDIKTUS BAKULA
&
WAKIL BUPATI ENDE
Dr. drg. DOMINIKUS M. L. L. L.
PERIODE 2025 - 2029



Monitoring perkembangan
penggunaan screen house di
Kabupaten Ende
0875 12333827, 865916
0470312125

KATAPENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 Kabupaten Ende dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyusunan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Renstra akan memuat Visi dan Misi Bupati, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Ende dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

DAFTAR ISI

JUDUL
PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERTANIAN 2025 – 2029..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... iv
DAFTAR TABEL..... v
DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende..... 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kab. Ende..... 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 34
3.2 Tujuan Rencana Strategi Dinas Pertanian Kab. Ende 2025-2029..... 35
3.3 Sasaran Rencana Strategi Dinas Pertanian Kab. Ende 2025-2029..... 35
3.4 Strategi Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2025-2029..... 37
3.5 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Ende Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029..... 40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program..... 43
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 44
4.3 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Uraian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Itama (IKU) Dinas Pertanian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 73

BAB V PENUTUP..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/Eselonering.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer.....	19
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian.....	20
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan.....	20
Tabel 2.6	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu.....	20
Tabel 2.7	Aset Dinas Pertanian Kab. Ende per 31 Desember 2024.....	21
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan, Horti, Perkebunan dan Peternakan (2020-2024) Terhadap Perjanjian Kerja.....	23
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.16	Isu Strategis Dinas Pertanian.....	33
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kab. Ende.....	36
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Pertanian 2026-2030	38
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Dinas Pertanian.....	41
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2026-2030	48
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	70
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2026-2030.....	74
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Tahun 2026-2030.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kab. Ende..... 18

Gambar 2.9 Diagram Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan..... 26

Gambar 2.10 Panen Simbolis Cabai di Kelompok tani 27

Gambar 2.11 Sosialisasi Cara Pengendalian Penyakit Darah Pisang..... 27

Gambar 2.13 Pencegahan dan Pengobatan Ternak Oleh Petugas..... 28

Gambar 2.14 Diagram Pagu dan Realisasi 2020-2024..... 29

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pertanian..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Ende berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ende.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Ende selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di sektor pertanian untuk menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, maka Dinas Pertanian Kabupaten Ende diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan bidang pertanian. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2014);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
23. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
24. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman perencanaan dan penganggaran kabupaten ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Ende Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Ende Nomor 4).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Ende yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan digunakan sebagai pedoman dan arah bagi seluruh jajaran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Ende dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban dinas Pertanian Kabupaten Ende;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati Ende 2025-2029;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB.I.PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu- isu strategis perangkat daerah.

4.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

4.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

4.3 Strategi perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

4.4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.1 Uraian Program

2.2 Uraian Kegiatan

- 2.3 Uraiaan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 2.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Uraian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian
- 2.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada BAB ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIAS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Ende

A. Tugas

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende adalah melaksanakan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

C. Struktur

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 3. Jafung Perencana
- c. Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian
 1. Kepala Bidang
 2. Jafung Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 3. Jafung Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
 4. Pengawas Pupuk dan Pestisida
 5. Analis Pupuk Anorganik

6. Analis Pesticida
7. Pemeriksa Pupuk dan Pesticida
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 1. Kepala Bidang
 2. Jabfung Medik Veteriner
 3. Jabfung Pengawas Bibit Ternak
 4. Jabfung Pengawas Mutu Pakan
 5. Jabfung Analis Pakan Ternak
 6. Jabfung Paramedik Veteriner
 7. Pengawas Lalulintas Hewan & Wilayah Karantina Hewan
 8. Pengawas Mutu Pakan & Produksi Bibit Ternak
 9. Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan & Semi Gaduhan
- e. Bidang Hortikultura
 1. Kepala Bidang
 2. Jabfung Jafung Analis Pasar Hasil Pertanian
- f. Bidang Penyuluh Pertanian dan Sumber Daya Manusia Pertanian
 1. Kepala Bidang
 2. Jabfung Penyuluh Pertanian
- g. Bidang Tanaman Pangan
 1. Kepala Bidang
 2. Jabfung Analis Pasar Hasil Pertanian
 3. Analis Potensi Budidaya Aneka Kacang & Umbi
- h. Bidang Perkebunan
 1. Kepala Bidang
 2. Pelaksana
 3. Jafung Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 4. Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan
 5. Analis Pasar Hasil Pertanian

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Ende sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 56 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

D. Uraian Jabatan

1. Kepala Dinas mempunyai Tugas :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;

- b. Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu,peredaran dan pengendalian,penyediaan benih tanaman,benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan pengunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pelaksaannya penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha /rekomendasi teknis pertanian;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas :

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pemeliharaan kantor, kearsipan dan perpustakaan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana,program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura,Perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. Pengelolaan kehumasan.

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- g. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunann kebijakan di bidang benih/ bibit,produksi, peternakan dan Kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- c. Pengendalian dan peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak,pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternkakan ,Kesehatan hewan dan Kesehatan veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepla Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura:

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Hortikultura meneyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Hortikultura;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
- f. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Hortikultura;
- g. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian :

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pertanian;
- b. Peneyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pstisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai demgam tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyususunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Penyusunann rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;

- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggualngan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
- f. Penanggualangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perekebunan, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas merencana operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian meliputi,kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan,penyelenggaraan penyuluhan serta program dan evaluasi penyuluhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penyelenggaraan kemampuan dan kapasitas penyuluh.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Memverifikasi langkah-langkah operasional bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memverifikasi penyusunan kebijakan teknis,rencana,dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. Memverifikasi penyusun norma,standar,prosedur,dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan,pendidikan,dan pelatihan pertanian;
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan pendidikan dan pelatihan pertanian;

- f. Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
- g. Mengkoordinasi pelaksanaan administrasi bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. Memverifikasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kab. Ende

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional

Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing

Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi, pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

Sub koordinator terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Substansi Keuangan
- b. Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Koordinator Substansi Sereal
- d. Sub Koordinator Substansi Aneka Kacang dan Umbi
- e. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
- f. Sub Koordinator Substansi Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak

- g. Sub Koordinator Substansi Kesehatan Hewan
- h. Sub Koordinator Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perternakan
- i. Sub Koordinator Substansi Buah dan Florikultural
- j. Sub Koordinator Substansi Sayuran dan Tanaman Obat
- k. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura
- l. Sub Koordinator Substansi Perluasan Areal, Irigasi dan Perlindungan Lahan
- m. Sub Koordinator Substansi Alat dan Mesin Pertanian
- n. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Tanaman, Pupuk dan Pestisida
- o. Sub Koordinator Substansi Tanaman Semusim dan Rempah
- p. Sub Koordinator Substansi Tanaman Tahunan dan Penyegar
- q. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- r. Sub Koordinator Substansi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
- s. Sub Koordinator Substansi Penyelenggaraan Penyuluhan dan
- t. Sub Koordinator Substansi Program dan Evaluasi Penyuluhan

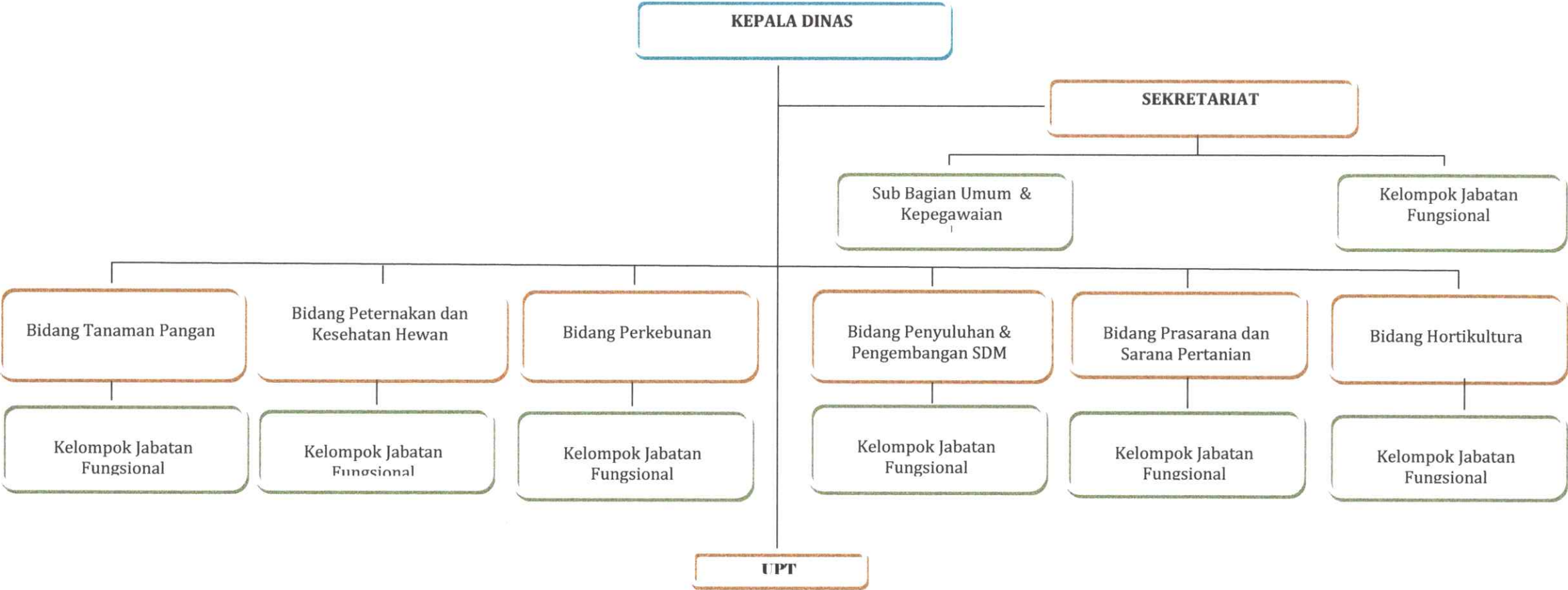
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan operasional dilapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu dengan instansi teknis lainnya maupun peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas operasional dan petugas fungsional.

Mengenai tenaga fungsional sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati. Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Ende



Bagan : Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 56 Tahun 2021

2.1.2 Sumber DayaManusia Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia aparatur. Rincian ketersediaan aparatur yang berada di Lingkup OPD adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Eselonering

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Eselonering

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Keterangan		
				Defenitif	PLT	Lowong
12.	Kepala Dinas	II -b	1	-	1	-
2.	Sekretaris	III -a	1	1	-	-
3.	Kepala Bidang	III - b	6	4	-	1
4.	Kepala Sub Bagian	IV-a	1	1	-	-
6.	Kepala UPT	IV-a	1	1	-	-
7.	KTU UPT	IV-b	1	1		
	Jumlah		11	9	1	1

2. jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer:

Tabel 2.3: Jumlah jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1. 3.	Fungsional tertentu	190	
2.	Fungsional umum	33	
3.	Struktural	10	
4.	Kontrak Propinsi	-	
5.	Kontrak Daerah	-	
6 .	Outsourcing	2	
	Jumlah	235	

3. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	
	- PNS Daerah Otonom Tk.II	167
	- PNS Daerah Otonom Tk.I	2
2	PPPK	66
2.	Tenaga Kontrak Daerah	-
3.	Tenaga Kontrak Propinsi	-
4.	Kontrak Pusat	-
5.	Kontrak Dinas	2
	Jumlah	237

4. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan :

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan :

No	Pangkat/ Golongan	PNS	PPPK	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama	-	-	-
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	-	7
3.	Pembina (IV/a)	15	-	15
4.	Penata Tk. I/ III-d	37	-	37
5.	Penata/ III-c	13	-	13
6.	Penata Muda Tk. I/ III-b	40	4	44
7.	Penata Muda / III -a	16	-	16
8.	Pengatur Tk. I/ II -d	17	34	51
9.	Pengatur/ II -c	9	13	22
10.	Pengatur Muda Tk. I/ II -	10	-	10
11.	Pengatur Muda/ II -a	1	15	16
12.	Juru Tk. I/ I-d	2	-	2
	Jumlah	167	66	233

5. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu :

Tabel 2.6 : Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu :

No	Pangkat/ Golongan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Pasca Sarjana			
	S2 Peternakan	4	-	4
2	Sarjana (S 1/ D IV) :			
	S1 Pertanian	38	28	66
	- S 1 Kehutanan	1	-	1
	- S 1 Teknologi Pertanian	6	2	7
	- S 1 Peternakan	13	4	17
	S 1 Kedokteran Hewan	3	4	7
	S1 Sosiatri	1	-	1
	S1 Ekonomi	1	-	1

	- D IV Penyuluhan	36	-	36
3.	Diploma III :			
	f. D3 Pertanian /	19	13	32
4.	SLTA :			
	- SMA/SPP/SPMA	44	15	59
5.	SD	2	-	2
	Jumlah	167	66	233

2.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Pertanian Kabupaten Ende menempati gedung di Jl.Diponegoro No 24 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Pertanian Kabupaten Ende sudah/belum memadai, karena banyak insfrastruktur pertanian beberapa ada yang telah habis umur teknisnya dan keterbatasan dukungan dana untuk pebangunan dan pemeliharaan. Adapundata sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Ende Per 31 Desember 2024

NO	NAMABARANG	JUMLAH ASET YANGDIMILIKI (Rp)		KET
		Jumlah	Satuan	
1	Tanah	37	Bidang	
2	Peralatan dan Mesin	467	Unit/buah	
3	Gedung dan Bangunan	88	Unit	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	12	Unit	
5	Aset Tetap Lainnya	1093	Ekor/unit	
6	Aset Lain-Lain	-	-	
Jumlah Aset Tetap + Aset Lainnya		1697		

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2024

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.1.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut bisa dijadikan dasar dan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan menggali potensi pertanian di Kabupaten Ende

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang diatur dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende, maka Dinas Pertanian Kabupaten Ende telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikulura, Perkebunan dan Peternakan (2020 – 2024)
terhadap perjanjian kerja

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya (ton/ha)	5,98	7,15	9,76	10,02	9,52	6,76	12,25	9,77	9,71	9,14	110,87	134,92	100,08	96,62	93,3
	a. Padi Sawah	6,91	7,02	7,01	7,02	5,02	7,09	7,04	7,01	6,48	4,85	102,66	100,24	100,00	92,33	96,67
	b. Padi Ladang	2,84	3,02	3,00	3,02	3,02	2,99	3,01	3,01	3,01	2,97	105,25	99,65	100,34	99,62	98,26
	c. Jagung	3,52	4,04	4,02	4,03	4,02	4,01	3,99	4,01	3,89	3,22	114,01	98,74	99,81	96,55	80,04
	d. Ubi kayu	10,66	14,50	25,00	26,00	26,00	12,96	27,95	25,04	25,47	25,54	121,54	241,06	100,15	97,97	98,22
2.	Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura (ton)	5,56	5,62	5,60	5,75	5,52	5,26	6,06	5,53	5,89	5,68	95,82	106,62	100,37	94,80	103,91
	a. Cabai Rawit	1,22	1,33	1,39	1,39	1,39	1,69	1,60	1,42	1,40	1,40	138,52	120,24	102,16	100,72	100,66
	b. Cabai Besar	1,47	1,57	1,58	1,59	1,60	1,57	1,60	1,64	1,73	1,74	106,80	101,85	103,90	108,93	108,98
	c. Bawang Merah	2,31	2,41	2,44	2,45	2,46	1,98	2,51	2,48	2,66	2,66	85,71	104,24	101,71	108,38	108,01
	d. Bawang Putih	2,25	2,35	2,28	2,29	2,31	0,29	2,41	2,38	2,60	2,60	12,89	102,41	104,30	113,54	112,55
	e. Pisang	7,67	7,77	7,78	8,55	8,41	7,77	8,13	8,13	8,56	7,74	104,52	104,65	104,52	100,09	91,98
	f. Mangga	6,25	6,35	6,54	6,99	6,69	5,97	6,00	6,62	6,99	6,99	101,27	94,56	101,27	100,00	104,49
	g. Alpukad	5,00	5,39	5,50	5,60	5,10	5,00	5,04	5,55	5,62	5,04	100,00	93,51	99,10	10,36	98,83
	h. Jahe	15,75	15,00	12,70	12,75	11,93	12,72	17,25	11,93	13,51	12,97	80,76	115,48	93,97	105,97	108,74
	i. Kunyit	6,85	7,00	7,65	7,70	7,68	7,55	8,05	7,63	7,70	7,70	110,22	114,29	99,72	99,97	100,23

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	j. Kencur	6,85	7,00	8.10	8.15	7,59	8,05	8,00	7.53	8.15	7,94	117,52	115,00	93.02	100.04	104,67
3.	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (7 komoditi unggulan daerah) / %	1,70	1,94	0,98	1,06	0,35	0,67	-0,17	0,28	0,20	-2,30	49,43	-19,90	48,77	8,72	-322,08
	a. Kelapa	1,40	1,50	1,00	1,20	0,15	1,32	-0,97	0,04	0,94	-0,69	94,29	-64,35	4,33	77,93	-402,99
	b. Kakao	1,00	1,60	1,77	1,78	0,17	0,12	0,20	0,05	0,83	0,52	12,00	12,64	2,96	46,35	275,15
	c. Jambu Mete	0,80	1,00	0,80	0,80	0,05	0,58	-0,65	0,06	0,25	0,88	72,50	-64,95	7,61	31,70	517,65
	d. Kopi	1,50	1,60	0,80	0,90	0,16	0,84	0,08	0,04	-0,98	-4,09	56,00	4,98	5,34	-108,52	-2270,68
	e. Pala	3,80	4,00	0,55	0,60	1,22	0,47	0,49	1,23	-0,02	-8,13	12,37	12,20	223,63	-3,86	-1.251,30
4.	Meningkatnya produksi hasil ternak (%)	2,85	3,00	2,13	2,13	1,13	2,94	-1,17	2,34	1,92	5,23	98,13	183,74	108,66	82,54	474,04
	a. Sapi	2,90	3,00	2,50	2,50	1,50	3,15	8,29	2,62	2,01	5,89	108,69	276,44	104,79	80,52	392,53
	b. Babi	4,90	5,00	2,00	2,00	1,00	4,98	-3,37	2,08	2,09	4,98	101,73	-67,41	103,94	104,49	497,72
	c. Kambing	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,59	12,69	1,05	0,40	2,16	74,17	1268,59	105,47	39,91	215,87
	d. Ayam	2,80	3,00	3,00	3,00	1,00	3,02	-22,28	3,61	3,16	7,90	107,93	-742,68	120,45	105,23	790,04

Gambaran capaian dan target untuk masing-masing indikator kinerja utama 2020-2024 adalah sebagai berikut :

A. Tanaman Pangan

Capaian indikator produktivitas komoditi tanaman pangan khususnya padi sawah naik turun dari tahun tahun ke tahun produktivitas tertinggi pada tahun 2021 sebesar 134,92 % dan terendah pada tahun 2024 sebesar 93,30% ada beberapa factor peningkatan dan penurunan produktivitas :

Peningkatan :

Kenaikan produktivitas ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti penggunaan sarana produksi pada tahun 2021 mendapatkan bantuan benih label biru sebanyak 2.825 Hektar tertinggi selama periode 2020-2024, penanganan pemeliharaan tanaman, kondisi ketersediaan air irigasi, adanya pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman dan pola penanganan pasca panen pada setiap musim tanamnya. Peningkatan produktivitas ini juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan seperti penyediaan fisik infrastruktur pertanian, pengembangan intensifikasi tanaman padi sawah, pengembangan perbenihan, penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Pendampingan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) serta Petugas Penganngu Organisme Tumbuhan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan produksi di sektor pertanian.

Penurunan

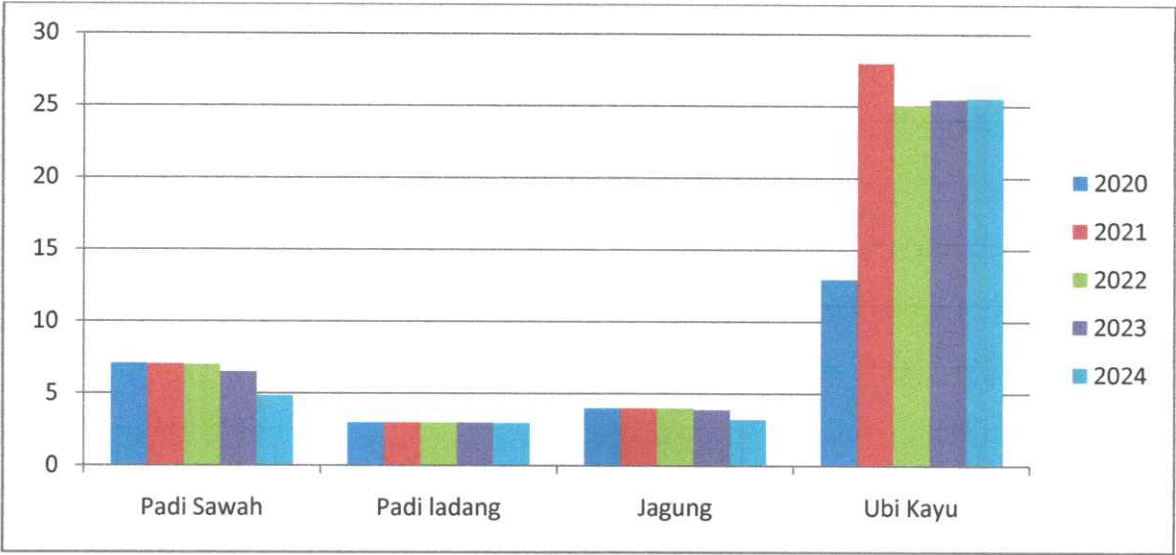
penurunan produktivitas terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,84 ton per hektar ,hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya fenomena elnino dimana hari tanpa hujan menjadi lebih panjang berdampak negatif pada sektor pertanian seperti k ekeringan yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu sampai ada yang gagal panen, dan penurunan kualitas tanaman sehingga target produktivitas yang telah ditetapkan tidak tercapai. Fenomena elnino dapat menyebabkan terjadinya gagal tanam serta puso (*kerusakan tanaman atau bagian tanaman. Puso dapat disebabkan oleh banjir, kekeringan, atau serangan OPT*) akibat kekeringan seluas 85,5 hektar.
2. Terjadi serangan hama penyakit pada tanaman dengan intensitas sedang sampai berat seperti hama keong mas, penggerek batang, walang sangit, hama putih palsu dan wereng
3. Rendahnya penggunaan pupuk oleh petani dalam usahatannya; dari alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Ene, pupuk urea dari alokasi sebanyak 1.100 ton hanya

diserap sebanyak 186,13 ton atau sebesar 16,9% dan pupuk NPK dari alokasi sebanyak 1.100 ton hanya diserap sebanyak 339,32 ton atau sebesar 30,8%, atau dengan kata lain sebagian petani tidak menggunakan pupuk dalam usahatani padi.

- 4. Sebagian besar petani menggunakan benih dari hasil panen tahun – tahun sebelumnya dimana kualitasnya semakin menurun. Bantuan benih berlabel dari pemerintah belum mengakomodir semua areal sawah yang ada.

Diagram 2.9 : Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan



B. Tanaman Hortikultura

Capaian indikator produktivitas komoditi hortikultura terisiri dari komoditi sayuran (Cabai rawit, cabai besar, bawang merah dan bawang putih) , buah (mangga, pisang dan alpukat) dan biofarmaka (jahe, kunyit dan kencur) dari kesembilan komoditi ini yang cenderung stabil adalah cabai rata-rata capaian 100% hal ini disebabkan :

- 1. Adanya gerakan tanam cabai dimana Dinas Pertanian Kab. Ende membagikan anakan kepada Dasa Wisma, Kelompok Tani dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Ende.
- 2. Tidak adanya serangan organisme pengganggu tanaman secara sporadis pada tanaman cabai.
- 3. Adanya bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Cabai dalam rangka mengatasi inflasi baik yang bersumber dari APBN maupun APBD II setiap tahun.
- 4. Harga cenderung stabil karena adanya asosiasi petani hortikultura yang membantu pemasaran cabai sehingga petani konsisten untuk menanamnya

Gambar 2.10. Panen Simbolis cabai di Kelompok Tani



Penurun terbesar untuk komoditi hortikultura adalah pisang hal ini disebabkan antar lain terserannya pisang oleh penyakit darah pisang (*Banana Blood Disease*) yang disebabkan oleh bakteri *Ralstonia solanacearum* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Sampai dengan tahun 2024 belum ada obat untuk menangani penyakit tersebut namun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dengan melakukan sosialisasi di lapangan bagaimana cara meminimalisir penyebaran penyakit tersebut.

Gambar 2.11. Sosialisasi cara pengendalian penyakit darah pisang



C. Tanaman Perkebunan

Ada 7 (tujuh) komoditi unggulan sektor pertanian yaitu Kepala, kakao, jambu mete, kopi, pala, kemiri dan cengkeh, untuk Capaian produksi tanaman perkebunan dari tahun 2020-2024 cenderung naik turun hal ini disebabkan fenomena alami yang disebut "**biennial bearing**" atau "**alternasi hasil**". Ini terjadi karena tanaman perkebunan memiliki pola berbuah yang bergantian antara tahun produksi tinggi dan tahun produksi rendah (Setelah tahun dengan produksi tinggi, tanaman mengalami kelelahan karena telah menghabiskan banyak energi untuk pembentukan bunga dan buah Akibatnya, pada tahun berikutnya, pertumbuhan bunga dan buah menjadi lebih sedikit. Hal lain yang

menyebabkan rendahnya produksi komoditi perkebunan adalah kurangnya peremajaan komoditi perkebunan di tingkat petani, atau menggantikan tanaman tua dengan tanaman yang baru dan diperparah dengan anomali iklim.

D. Peternakan

Indikator kinerja utama Komoditi peternakan yaitu dihitung dari produksi daging sapi, kerbau,kambing, babi dan ayam.

Untuk sektor ini cenderung stabil karena beberapa hal antara lain:

peningkatan konsumsi daging di tingkat masyarakat terlihat Produksi daging tahun 2024 sebanyak 1.475.450,88 Kg tertinggi daging 713.176 Kg sedangkan populasi ternak khususnya sapi di kabupaten Ende sebanyak 37.995 ekor yang tersebar di 20 kecamatan, dengan pupulasi tertinggi ada di Kecamatan Wewaria denga populasi ternak sapi sebanyak 9.871ekor dan tern babi sebanyak 75.456 ekor.

Tercapainya target yang ditetapkan karena rutinya pelaksanaan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) serta pencegahan dan pengendalian penyakit ternak oleh petugas puskesmas yang ada disetiap kecamatan.

Gambar 2.13. Pencegahan dan pengobatan ternak oleh Petugas

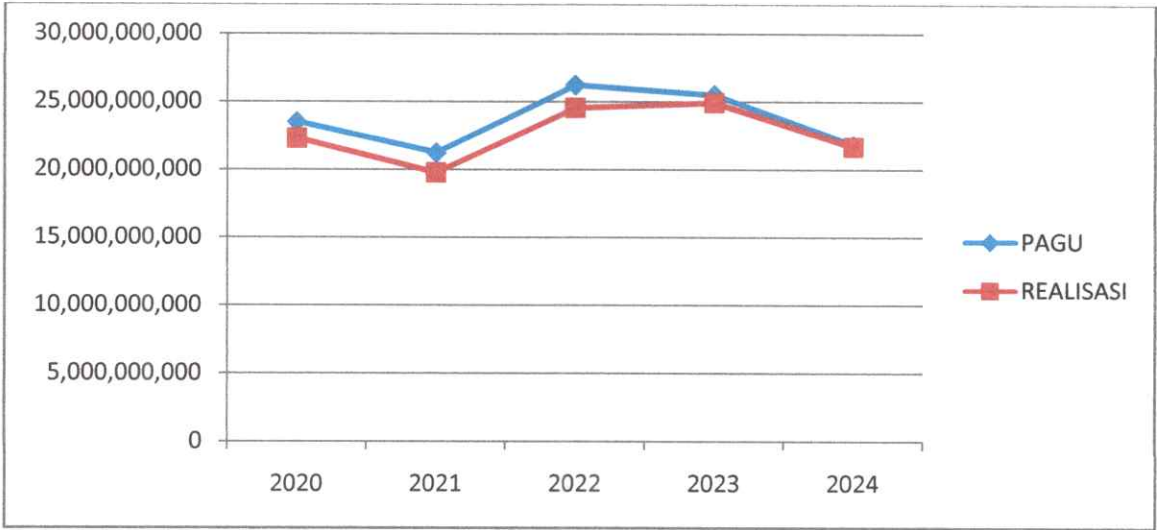


E. Capaian Kinerja Keuangan

Pertumbuhan pendapatan tahun 2020 – 2024 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 1.157.632.110 atau 89,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.298.388.000,-. Selama periode tahun 2020–2024 pelaksanaan berbagai program dan kegiatan rutin dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende, mendapat total dukungan Dana dari APBD II Kabupaten Ende Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 118.293.021.507,- yang terdiri dari Belanja Operasional berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 75.724.338.954,- Belanja Barang dan jasa Sebesar Rp.29.252.458.770,- Belanja Hibah Rp.8.529.620.919,- Belanja Modal Sebesar Rp. 4.786.602.864,- dengan total realisasi Tahun Anggaran 2020-2024 Sebesar Rp.

113.223.724.233,- atau 95,71% .

Diagram 2.14 : pagu dan Realisasi 2020-2024



Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini Pencapaian Kinerja Keuangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Ende tahun 2020-2024:

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2020 -2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	250.000.000	273.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000	268.437.110	270.472.500	228.002.500	181.880.000	208.160.000	107,37	99,07	82,31	65,66	65,67
Pendapatan Asli Daerah	250.000.000	273.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000	268.437.110	270.472.500	228.002.500	181.880.000	208.160.000	107,37	99,07	82,31	65,66	65,67
BELANJA OPERASIONAL	21.108.314.030	23.413.678.626	25.451.306.052	21.775.940.181	32.547.088.480	19.643.733.503	21.769.097.096	24.878.255.396	21.599.063.314	29.858.196.820	93,06	92,98	97,75	99,32	91,74
Belanja Pegawai	12.900.472.030	16.648.213.936	15.956.182.263	15.205.833.491	15.704.345.595	12.668.810.571	15.396.430.101	15.554.958.712	15.092.929.162	15.267.894.995	98,20	92,48	97,49	99,45	97,22
Belanja Barang dan Jasa	8.207.842.000	5.619.450.390	2.111.517.170	6.570.106.690	16.842.742.885	6.974.922.932	5.226.652.695	2.086.964.504	6.506.134.152	14.590.301.825	84,98	93,01	98,84	99,03	86,63
Belanja Hibah	0	1.146.014.300	7.383.606.619	0	0	0	1.146.014.300	7.236.332.180	0	0	0	100	98,01	0	0
BELANJA MODAL	137.234.000	2.804.276.874	47.443.430	60.965.810	2.503.000	133.409.900	2.784.961.615	47.441.430	60.965.810	162.829.560	97,21	99,31	100	100	99,97
JUMLAH	21.245.548.030	26.217.955.500	25.498.749.482	21.836.905.991	32.709.970.095	19.777.143.403	24.554.058.711	24.925.696.826	21.660.029.124	30.021.026.380	93,09	93,65	97,75	99,32	91,78

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende meliputi:

1. Petani dan Keluarga Tani
 - a. Petani tanaman pangan
 - b. Petani hortikultura
 - c. Petani perkebunan
 - e. Peternak
 - f. Rumah tangga petani (termasuk perempuan tani dan pemuda tani).
2. Kelompok Usaha dan Kelembagaan Petani
 - a. Kelompok Tani (Poktan)
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
 - c. Kelompok Ternak
 - d. Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - e. Kelompok Pemuda Tani/Milenial
 - f. Lembaga ekonomi petani (koperasi, BUMDes pertanian, unit usaha tani).
3. Pelaku Usaha Agribisnis
 - a. UMKM berbasis hasil pertanian
 - b. Pengusaha Pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
 - c. Pedagang sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida, pakan, dll)
 - d. Pelaku usaha pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian.
4. Masyarakat Umum dan Konsumen
 - e. Konsumen produk pertanian yang membutuhkan kualitas, keamanan, dan keterjangkauan harga pangan.
 - f. Konsumen yang membutuhkan pelayanan sektor pertanian
5. Aparatur dan Tenaga Teknis Pertanian
 - a. Penyuluh pertanian lapangan (PPL)
 - b. Petugas teknis lapangan lainnya
 - c. ASN Dinas Pertanian
6. Lembaga Pendukung
 - d. Lembaga Pemerintahan Lainnya (OPD, Kecamatan, Desa, Dll)
 - e. Sekolah (dalam program pertanian sekolah atau KRPL)
 - f. Perguruan tinggi/ lembaga riset pertanian
 - g. Lembaga keuangan (bank, koperasi kredit, lembaga pembiayaan usaha tani).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende

2.2.1 Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Dinas Pertanian Kabupaten Ende memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende, maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Ende membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di Pertanian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Ende memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Ende.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende sebagai berikut:

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
2. Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mengantisipasi anomali iklim di Kabupaten Ende;
3. Belum optimalnya pembangunan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan berbasis kawasan;
4. Masih rendahnya pemanfaatan pekarangan rumah sebagai Rumah Pangan Lestari (RPL);
5. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilam petani serta lemahnya kelembagaan tani;
6. Belum optimalnya ketersediaan tenaga dan pendampingan PPL dan petugas peternakan kepada kelompok tani/ternak;
7. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
8. Belum berkembang argrowisata dan Agroindustri;
9. Minimnya akses pada benih unggul Baik tanaman maupun ternak, pupuk organik dan pelatihan pertanian ramah lingkungan;
10. Terjadi perubahan iklim yang mempengaruhi musim tanam dan hasil produksi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi Bupati Ende, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Isu Strategis Dinas Pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANG AN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan Produksi Produktivitas pertanian serta komoditi Unggulan	Keterbatasan akses sarana produksi (benih/bibit unggul, pupuk, obat-obatan, pakan)	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Belum Optimal	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung g Jawab serta Penanganan Perubahan Iklim global (climate change)	Deindustria lisasi Dini dan produktivit as sektor pertanian yang masih rendah	Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum menmberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditi unggulan	peningkatan produktivitas melalui teknologi tepat guna, bibit unggul, dan pupuk berimbang
	Kurangnya keterampilan dan kapasitas SDM Aparatur dan petani/peternak					
	Perubahan iklim global → gagal panen, serangan OPT meningkat.					
	Infrastruktur pertanian kurang memadai					
Lahan pertanian lahan kering yang luas meskipun terbatas irigasi	Infrastruktur pertanian khususnya irigasi yang terbatas					penguatan kelompok tani, koperasi, dan akses permodalan
Potensi pengembanga n pertanian organik dan Pertanian agrowisata	Belum adanya lokasi khusus lokasi agrowisata yang dikembangkan dengan baik					pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung pertanian
	Produk pertanian lokal belum dikemas menarik untuk wisatawan					
Adanya rumah tangga petani sebanyak 40.739 rumah Tangga	Kurangnya keterampilan dan kapasitas petani/peternak					Diversifikasi pangan dan pengembanga n komoditas unggulan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi, Misi Dan Program Prioritas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi

Visi Bupati Ende yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 yakni :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN ENDE YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN BERBASISKAN IMAN DAN BUDAYA MENUJU ENDE LIO NAGE SARE PAWE”

B. Misi

Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende termasuk dalam Misi ke-2 dan ke-6 yaitu:

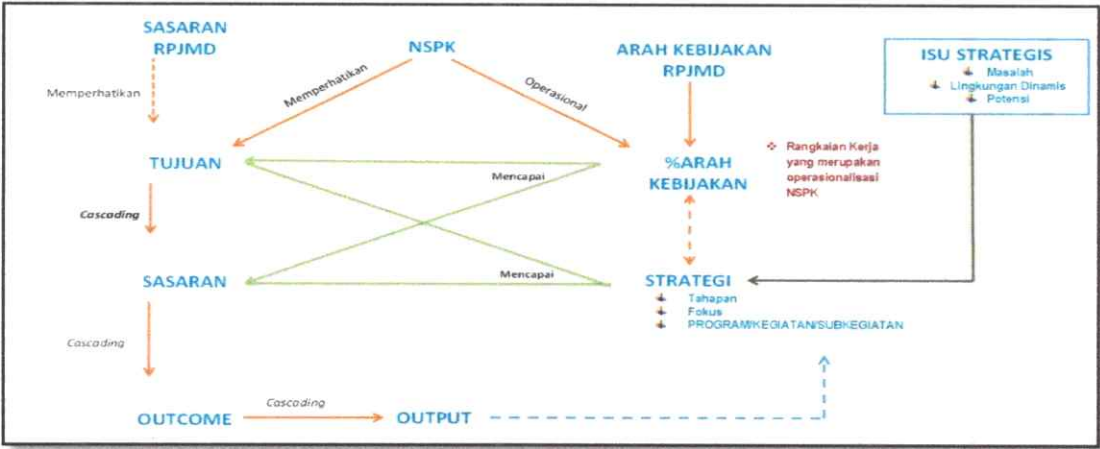
- 1. **Misi Ke 2 (dua) Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru**

Pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat merupakan faktor penting dalam peningkatan produktivitas masyarakat. Misi kedua ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan produktivitas masyarakat dan pemberdayaan sektor-sektor unggulan berbasis ekonomi hijau dan biru agar sektor-sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dan kompetitif.

- 2. **Misi ke 6 (enam) Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang.**

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri. Dilevel daerah kedaulatan pangan berhubungan dengan kemampuan daerah dalam memastikan ketersediaan dan ketercukupan pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di daera

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pertanian



3.2 Tujuan Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Ende 2025-2029

Tujuan dari Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah untuk menetapkan arah kebijakan dan menjadi acuan kerja bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut. Renstra juga berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, serta sebagai instrument pengendalian dan evaluasi kinerja

Adapun tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dicapai adalah **Meningkatnya kinerja sektor Pertanian** dengan indikator tujuannya **Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)**.

3.3 Sasaran Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Ende 2025-2029

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah target-target spesifik yang ingin dicapai oleh sebuah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, yang mengacu pada visi, misi, tujuan, serta strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja Pembangunan. Sasaran yang ditetapkan akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Pertanian Ende Tahun 2025-2029. Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende periode 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) sasaran yakni:

1. Produksi Tanaman Pangan
2. Produksi Tanaman Hortikultura
3. Produksi Tanaman Perkebunan
4. Produksi Peternakan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kab. Ende

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN							KET
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial daerah	Meningkatnya kinerja sektor Pertanian		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	32,13	32,56	32,99	33,42	33,85	34,28	
		Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Ton	73.612,22	75.096,91	76.619,04	78.179,66	79.779,88	80.577,67	
		Produksi Tanaman Hortikultura	Peningkatan Produksi Holtikultura	Ton	7.615,21	7.671,70	7.728,67	7.786,10	7.844,01	7.922,45	
		Produksi Peternakan	Peningkatan Produksi Pertenakan	Ton	1.457,13	1.462,87	1.468,64	1.474,44	1.480,26	1.486,11	
		Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	27.628,97	27.757,91	27.891,74	28.025,79	28.168,85	28.313,10	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Predikat	B	B	B	B	B	B	

3.4 Strategi Dinas Pertanian Kab. Ende dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Strategi adalah Langkah-langkah yang berisikan program prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kinerja sektor Pertanian dengan sasarannya yaitu Produksi Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Hortikultura, Produksi Tanaman Perkebunan, Produksi Peternakan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, maka terdapat beberapa Strategi yang dapat digunakan antara lain :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang;
2. Meningkatkan kinerja sektor unggulan dan potensial daerah;
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian;
4. Pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas strategis secara terpadu dan terintegrasi;
5. Pengembangan Sistem penyediaan benih/bibit daerah;
6. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan dan air;
7. Pengendalian laju alih fungsi lahan;
8. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani;
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Pertanian 2026 - 2030

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
IV. ENDE PRODUKTIF : Membangun Kabupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian				
PemetaanPotensi&Konsolidasi SDM	Penguatan Infrastruktur dan Akses Produksi	Pengolahan, Hilirisasi& Akses Pasar	Inovasi Teknologi & Digitalisasi Usaha Rakyat	Keberlanjutan, Evaluasi & Replikasi Model Usaha
Fokus: Identifikasi potensi wilayah & penguatan kapasitas dasar masyarakat	Fokus: Penyediaan sarana produksi & peningkatan kapasitas teknis	Fokus: Nilai tambah hasil produksi & perluasan akses pasar	Fokus: Modernisasi usaha rakyat melalui teknologi & digitalisasi	Fokus: Evaluasi program & pembangunan sistem ekonomi lestari
✚ Pemetaan komoditas unggulan per sektor: pertanian, perkebunan, ✚ Pendataan petani, dan kelompok tani ✚ Pelatihan dasar produktivitas & kewirausahaan masyarakat desa ✚ Pembentukan klaster usaha produktif berbasis wilayah ✚ Bantuan sarana produksi pertanian	✚ Pembangunan/rehabilitasi sarana produksi ✚ Bantuan alat dan mesin pertanian ✚ Pelatihan teknis: budidaya modern, pasca panen, pengolahan hasil ✚ Penataan kawasan sentra produksi (pertanian terpadu, minapolitan, agrowisata) ✚ Bantuan sarana produksi pertanian	✚ Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) pertanian, perkebunan ✚ Sertifikasi produk ✚ Kolaborasi dengan BUMDes untuk pengelolaan hasil produksi ✚ Promosi produk “Ende Produktif” melalui event, expo, dan platform digital	✚ Digitalisasi rantai pasok dan pemasaran produk melalui aplikasi lokal ✚ Penerapan teknologi tepat guna: irigasi tetes, bioflok, pupuk organik, drone pertanian ✚ Integrasi program dengan pendidikan vokasi dan pelatihan ✚ Pembangunan Pusat Inovasi & Teknologi Sumber Daya Lokal	✚ Evaluasi dampak ekonomi dan ekologi dari program ENDE PRODUKTIF ✚ Replikasi model klaster sukses ke wilayah lain ✚ Penetapan kawasan pengembangan ekonomi berbasis SDA lestari ✚ Integrasi kebijakan hulu-hilir: produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran ✚ Penguatan regulasi dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan

XII. ENDE KREATIF : Membangun Kabupaten Ende yang berdaya saing melalui Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang (fokus pada bidang pertanian: agroindustri, agrowisata)				
IdentifikasiPotensi&Perencanaan Kawasan KreatifPertanian	Pengembangan Agroindustri Skala Kecil & Menengah	Pengembangan Agrowisata dan Branding Kawasan	Skalabilitas & Ekspansi Produk Kreatif Pertanian	Konsolidasi Ekosistem Pertanian Kreatif dan Daya Saing Daerah
Fokus: Mengidentifikasi potensi komoditas unggulan pertanian dan merencanakan kawasan pertanian yang kreatif dan berkelanjutan	Fokus: Membangun unit pengolahan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendukung UMKM	Fokus: Membangun dan mempromosikan kawasan agrowisata sebagai daya tarik wisata berbasis pertanian dan budaya	Fokus: Memperluas pasar dan distribusi produk agroindustri serta meningkatkan akses pelaku usaha pada pasar yang lebih luas	Fokus: Menyusun kebijakan dan insentif untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor agroindustri dan agrowisata
- Pemetaan komoditas unggulan pertanian per wilayah (kopi, kakao, hortikultura) - Identifikasi potensi kawasan agrowisata (lanskap, budaya tani, desa wisata) - Penyusunan masterplan pengembangan agroindustri dan agrowisata - Pembentukan forum pelaku pertanian kreatif (petani milenial, BUMDes, Koperasi Merah Putih) - Pelatihan dasar inovasi produk pertanian	- Pendirian unit pengolahan hasil tani (pengering, penggilingan, pengemasan) - Inkubasi usaha tani kreatif dan UMKM agroindustri - Sertifikasi produk pertanian unggulan - Promosi produk unggulan lokal melalui pameran, festival, dan marketplace digital - Kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi pertanian	- Pembangunan sarana agrowisata: pusat edukasi tani - Branding kawasan agrowisata: "Desa Kopi Ende", "Kampung Hortikultura", dll. - Integrasi agrowisata dengan atraksi budaya dan kuliner lokal	- Dukungan akses pasar nasional dan regional untuk produk agroindustri - Penguatan logistik dan konektivitas desa produksi dengan pasar - Pendampingan legalitas usaha tani kreatif dan perluasan jaringan distribusi - Replikasi model agroindustri dan agrowisata ke kecamatan lain	- Evaluasi dampak sosial-ekonomi agroindustri dan agrowisata - Penetapan kawasan kreatif pertanian berkelanjutan - Integrasi sistem digital dalam manajemen hasil tani - Branding Kabupaten Ende sebagai "Pusat Agroindustri dan Agrowisata Inovatif di NTT" - Penyusunan kebijakan insentif jangka panjang untuk pelaku agroindustri-agrowisata

3.5 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Ende Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kab.Ende yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 selengkapnya dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Dinas Pertanian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN	KET
1.		Penguatan infrastruktur untuk pengembangan Pertanian yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.	1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan 2 Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian 3 Meningkatkan Produktivitas Pertanian Unggulan Berbasis Potensi Lokal	
2.		Peningkatan Kualitas Lahan, Penggunaan Teknologi Pertanian Modern, Diversifikasi Komoditas, Penguatan Infrastruktur, Dan Penguatan Kelembagaan Pertanian dan SDM, Serta Pelatihan Dan Pendampingan Bagi Petani, Ketahanan Pangan	1 Pengembangan Agroindustri 2 Peningkatan Akses Jalan ke lahan pertanian 3 Peningkatan Produktivitas Pertanian 4 Penyediaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan 5 Penyediaan Sarana Pengolahan 6 Peningkatan Kualitas SDM Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Pertanian 7 Peningkatan Kapasitas Petani dan Aparatur 8 Penegakan Aturan Zonasi untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian 9 Pemanfaatan Lahan yang Efisien 10 Pengembangan Sistem Pertanian Berkelanjutan 11 Penggunaan Teknologi Pertanian 12 Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan 13 Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dan Berkelanjutan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN	KET
			14 Konservasi Tanah 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pemetaan lahan, monitoring hasil panen, dan penyebaran informasi pertanian 16 Penggunaan Teknologi Pertanian yang ramah lingkungan dan efisien 17 Penguatan Kelembagaan Pertanian 18 Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Pertanian	
		Peningkatan Efisiensi Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, serta Pengembangan Inovasi Produk dan Pasar, dengan dukungan Infrastruktur yang Memadai dan SDM yang Kompeten.	1. Peningkatan Produktivitas melalui irigasi efisien, pupuk yang tepat, dan varietas unggul 2. Penggunaan Pupuk Organik 3. Penyediaan Bibit Unggul 4. Pengendalian Hama dan Penyakit 5. Fasilitasi Pengolahan 6. Diversifikasi Produk dan Pengembangan Produk Unggulan lokal 7. Peningkatan Kualitas Produk 8. Pelatihan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM petani 9. Kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian 10. Kerja Sama Antar Lembaga untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung didalam program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Ende .Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Ende tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi.Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Dinas Pertanian Kabupaten Ende melaksanakan 6 (lima) Program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Kinerja penyelenggaran bidang Pertanian dibuat sampai dengan tahun 2030 agar program kerja pada tahun 2030 tetap memperhatikan kesinambungan perencanaan perangkat daerah sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah pada tahun 2030 nanti. Program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rincian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagai berikut :

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau
 - f. Bangunan Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - c. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
 - d. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 - e. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
 2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - f. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - g. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
 2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
- g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- h. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- i. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas
- j. Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak
- e. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - 1. Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - b. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan
- f. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- g. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 4.2: Program/ Kegiatan/sub Kegiatan Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial daerah	Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial daerah				Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB		
		Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian			1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 4. Peningkatan Produksi Peternakan		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Laporan Distribusi pengawasan dan pendampingan sarana pertanian	Jumlah Laporan Distribusi pengawasan dan pendampingan sarana pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten /kota lain	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis		Luas lahan pangan berkelanjutan (ha)			Luas LP2B yang dipertahankan (Ha)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
potensi wilayah dan tata ruang		konversi lahan pertanian terhadap total lahan pertanian (%)			Persentase Lahan Pertanian sawah yang dipertahankan (%)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatnya prasarana pertanian yang dikembangkan	Presentase prasarana pertanian yang dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
					Lahan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Prasarana pertanian yang di rehab / dibangun	Jumlah Prasarana pertanian yang di rehab / dibangun	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan /Produksi Ternak yang	Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					dibangun dan direhabilitasi	Pembibitan /Produksi Ternak	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
			Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		1. Tingkat pengendalian penyakit menular strategis (PHMS) 2. Presentase unit Usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Laboratorium	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
					Jumlah Pelayanan Veteriner	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Petugas Teknis	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		a. Presntase penanganan bencana pertanian b. Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Prenstase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatka	Program Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas tata kelola Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	Perencanaan Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Politian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3: Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dinas Pertanian					28.650.000.000		29.211.540.000		30.029.463.120		31.170.582.714		32.191.868.082	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan			6.875.870.000		7.325.870.000		7.775.870.000		8.525.870.000		9.225.870.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Distribusi pengawasan dan pendampingan sarana pertanian	4 Laporan	4 Laporan	6.125.870.000	4 Laporan	6.575.870.000	4 Laporan	6.989.758.400	4 Laporan	7.709.886.160	4 Laporan	8.378.878.775	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	3.059.500.000	1 Laporan	3.159.500.000	1 Laporan	3.259.500.000	1 Laporan	3.459.500.000	1 Laporan	3.659.500.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1.720.000.000	1 Laporan	1.820.000.000	1 Laporan	1.920.000.000	1 Laporan	2.120.000.000	1 Laporan	2.320.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	2 ton	8 ton	110.000.000	25 ton	210.000.000	35 ton	310.000.000	45 ton	410.000.000	50 ton	460.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	1.236.370.000	1 Laporan	1.386.370.000	1 Laporan	1.500.258.400	1 Laporan	1.720.386.160	1 Laporan	1.939.378.775	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Laporan	2 Laporan	750.000.000,00	2 Laporan	750.000.000,00	2 Laporan	786.111.600,00	2 Laporan	815.983.840,00	2 Laporan	846.991.225,00	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 ton	1 ton	50.000.000,00	1 ton	50.000.000,00	1 ton	50.000.000,00	1 ton	50.000.000,00	1 ton	50.000.000,00	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten /kota lain	349 ekor	400 ekor	700.000.000,00	450 ekor	700.000.000,00	500 ekor	736.111.600,00	550 ekor	765.983.840,00	600 ekor	796.991.225,00	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Terbangunnya prasarana pertanian yang memadai	44 Unit	81 Unit	10.550.000.000	95 Unit	10.650.000.000	103 Unit	10.670.000.000	108 Unit	10.745.000.000	111 Unit	10.945.000.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	0 Laporan	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	0 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang di rehab / dibangun	44 Unit		10.445.000.000		10.520.000.000		10.520.000.000		10.595.000.000		10.795.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	0 Unit	5 Unit	750.000.000	7 Unit	1.050.000.000	7 Unit	1.050.000.000	7 Unit	1.050.000.000	10 Unit	1.050.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	39 Unit	14 Unit	1.500.000.000	14 Unit	1.500.000.000	14 Unit	1.500.000.000	14 Unit	1.500.000.000	24 Unit	1.700.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	0 Unit	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	11 Unit	1.000.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	0 Unit	14 Unit	375.000.000	20 Unit	300.000.000	20 Unit	300.000.000	23 Unit	375.000.000	22 Unit	375.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	1.000.000.000	3 Unit	1.000.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	3 Unit	2 Unit	300.000.000	3 Unit	450.000.000	3 Unit	450.000.000	2 Unit	450.000.000	2 Unit	450.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit	24 Unit	4.320.000.000	24 Unit	4.320.000.000	24 Unit	4.320.000.000	24 Unit	4.320.000.000	24 Unit	4.320.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak	0 Unit	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	0 Unit	6 Unit	900.000.000	4 Unit	600.000.000	4 Unit	600.000.000	4 Unit	600.000.000	4 Unit	600.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Rumah Potong Hewan	0 Unit	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	800.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat pengendalian penyakit menular strategis (PHMS)	3 Laporan	3 Laporan	1.800.000.000	3 Laporan	1.811.540.000	3 Laporan	1.911.540.000	3 Laporan	2.011.540.000	3 Lapora n	2.061.540.000	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	605.000.000	1 Laporan	616.540.000	1 Laporan	616.540.000	1 Laporan	666.540.000	1 Laporan	691.540.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	605.000.000	1 Laporan	616.540.000	1 Laporan	616.540.000	1 Laporan	666.540.000	1 Laporan	691.540.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.100.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	220.000.000	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	145.000.000	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	28 Orang	14 Orang	75.000.000	14 Orang	75.000.000	14 Orang	75.000.000	14 Orang	75.000.000	14 Orang	75.000.000	
Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian		1. Presntase penanganan bencana pertanian	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
		2. Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian												
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5 Ha	10 Ha	250.000.000	12 Ha	250.000.000	14 Ha	350.000.000	16 Ha	400.000.000	18 Ha	400.000.000	-
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	10 Ha	250.000.000	12 Ha	250.000.000	14 Ha	350.000.000	16 Ha	400.000.000	18 Ha	400.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penyuluhan Pertanian		Prenstase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100%	100%	1.040.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.087.923.120	100%	1.154.042.714	100%	1.174.042.714	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1.040.000.000	1 Laporan	1.040.000.000	1 Laporan	1.087.923.120	1 Laporan	1.154.042.714	1 Laporan	1.174.042.714	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21 unit	21 unit	40.000.000	21 unit	40.000.000	21 unit	40.000.000	21 unit	40.000.000	21 unit	60.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21 Unit	21 Unit	80.000.000	21 Unit	80.000.000	21 Unit	127.923.120	21 Unit	127.923.120	21 Unit	127.923.120	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21 unit	21 unit	35.000.000	21 unit	35.000.000	21 unit	35.000.000	21 unit	35.000.000	21 unit	35.000.000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	21 unit	21 unit	840.000.000	21 unit	840.000.000	21 unit	840.000.000	21 unit	906.119.594	21 unit	906.119.594	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat Kapasitas Penyuluh pertanian	0 orang	35 orang	35.000.000	35 orang	35.000.000	35 orang	35.000.000	35 orang	35.000.000	35 orang	35.000.000	
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	21 unit	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	8.134.130.000	3 Laporan	8.134.130.000	3 Laporan	8.234.130.000	3 Laporan	8.334.130.000	3 Laporan	8.385.415.368	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.744.355.498	1 Laporan	5.909.355.498	1 Laporan	5.890.348.808	1 Laporan	5.988.848.808	1 Laporan	6.326.134.176	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ bulan	102 Orang/ bulan	5.699.355.498	102 Orang/ bulan	5.854.355.498	110 Orang/ bulan	5.835.348.808	110 Orang/ bulan	5.933.848.808	110 Orang/ bulan	6.241.134.176	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	70.000.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	315.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	339.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	45.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	20 Orang	240.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	240.000.000	22 Orang	264.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	295.000.000	1 Laporan	345.000.000	1 Laporan	439.000.000	1 Laporan	439.000.000	1 Laporan	439.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	55.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	860.000.000	1 Laporan	860.000.000	1 Laporan	860.000.000	1 Laporan	860.000.000	1 Laporan	510.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	8 Unit	200.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	6 Unit	150.000.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	300.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	1 paket	25.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU	Base Line 2024	TARGET INDIKATIF DAN PAGU										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	139.774.502	1 Laporan	139.774.502	1 Laporan	164.781.192	1 Laporan	166.281.192	1 Laporan	166.281.192	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	32.774.502	1 Laporan	32.774.502	1 Laporan	33.781.192	1 Laporan	33.781.192	1 Laporan	33.781.192	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	395.000.000	1 Laporan	425.000.000	1 Laporan	425.000.000	1 Laporan	425.000.000	1 Laporan	425.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	80.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	40.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	

Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1.	ENDE PRODUKTIF : Membangun Kabupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan , UMKM Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : ➤ Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi ➤ Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian ➤ Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan : ➤ Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain ➤ Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
		Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ➤ Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ➤ Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium ➤ Penyediaan Pelayanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Jasa Medik Veteriner ✚ Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : ➤ Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan ➤ Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	✚ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : ➤ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa ➤ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa ➤ Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ➤ Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota ➤ Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian ➤ Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
2.	ENDE KREATIF : Membangun Kabupaten Ende yang berdaya saing melalui Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang (fokus pada bidang pertanian: argoindustri, agrowisata)	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	✚ Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : ➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya ➤ Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota ➤ Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B diKabupaten/Kota ✚ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya ➤ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya ➤ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ➤ Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak ➤ Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	✚ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ➤ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

4.3 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Uraian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pertanian untuk menunjang pencapaian target yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ende 2025-2029 . Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah yang serta target tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2026 – 2030

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN							KET
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	73.612,22	75.096,91	76.619,04	78.179,66	79.779,88	80.577,67	
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	7.615,21	7.671,70	7.728,67	7.786,10	7.844,01	7.922,45	
	Produksi Peternakan	Ton	1.457,13	1.462,87	1.468,64	1.474,44	1.480,26	1.486,11	
	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	27.628,97	27.757,91	27.891,74	28.025,79	28.168,85	28.313,10	
4.	Nilai AKIP Dinas Pertanian	%	B	B	B	B	B	B	

Tabel 4.6: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Tahun 2026-2030

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Dinas Pertanian									
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perkebunan	Ton	110.188,61	111.989,39	113.708,09	115.465,99	117.272,99	118.299,33	
				Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Ton	73.612,23	75.096,91	76.619,04	78.179,66	79.779,87	80.577,67	
				a. Padi Sawah	Ton	28.711,01	29.572,34	30.459,52	31.373,30	32.314,50	32.637,64	
				b. Padi Ladang	Ton	7.096,11	7.167,07	7.238,74	7.311,13	7.384,24	7.458,08	
				c. Jagung	Ton	9.000,25	9.270,26	9.548,36	9.834,81	10.129,86	10.231,16	
				d. Ubi Kayu	Ton	27694,604	27.971,55	28.251,27	28.533,78	28.819,12	29.107,31	
				e. Ubi Jalar	Ton	1003,191	1.008,21	1.013,25	1.018,31	1.023,41	1.033,64	
				f. Kacang Tanah	Ton	41,2452	41,45	41,66	41,87	42,08	42,5	
				g. Kacang Hijau	Ton	27,4365	27,57	27,71	27,85	27,99	28,27	
				h. tanaman lokal	Ton	38,3766	38,45	38,53	38,61	38,68	39,07	
				Peningkatan Produksi Holtikultura	Ton	7.615,21	7.671,70	7.728,67	7.786,10	7.844,01	7.922,45	
				a. Kol / Kubis	Ton	84,64	85,48	86,34	87,2	88,07	88,95	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
		b. Cabe Rawit	Ton	100,31	101,31	102,32	103,35	104,38	105,42	
		c. Tomat	Ton	170,04	171,75	173,46	175,2	176,95	178,72	
		d. Cabe Keriting	Ton	117,9	119,08	120,27	121,48	122,69	123,92	
		e. Bawang Merah	Ton	121,32	122,53	123,76	125	126,25	127,51	
		f. Bawang Putih	Ton	13,13	13,26	13,39	13,53	13,66	13,8	
		g. Mangga	Ton	1.454,20	1.461,47	1.468,77	1.476,12	1.483,50	1.498,33	
		h. Pisang	Ton	2.102,18	2.112,69	2.123,25	2.133,87	2.144,54	2.165,98	
		i. Advokat	Ton	374,91	376,78	378,66	380,56	382,46	386,28	
		j. Jahe	Ton	2.371,77	2.395,49	2.419,45	2.443,64	2.468,08	2.492,76	
		k. Kencur	Ton	288,86	291,75	294,67	297,61	300,59	303,59	
		l. Kunyit	Ton	415,95	420,11	424,31	428,56	432,84	437,17	
		Peningkatan Produksi Pertenakan	Ton	1.457,13	1.462,87	1.468,64	1.474,44	1.480,26	1.486,11	
		a. Sapi	Ton	465,3	466,7	468,1	469,5	470,91	472,32	
		b. Babi	Ton	716,74	720,33	723,93	727,55	731,18	734,84	
		c. Kambing	Ton	46,14	46,28	46,42	46,55	46,69	46,83	
		d. Unggas	Ton	228,95	229,58	230,21	230,84	231,48	232,11	
		Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	27.504,05	27.757,91	27.891,74	28.025,79	28.168,85	28.313,10	
		a. Kelapa Dalam	Ton	9.240,20	9.426,86	9.523,96	9.619,20	9.720,20	9.822,26	
		b. Jambu Mete	Ton	3.988,21	3.993,40	3.996,59	4.000,19	4.004,19	4.008,19	
		c. Kopi	Ton	2.891,98	2.902,11	2.907,62	2.913,44	2.920,72	2.928,03	
		d. Kakao	Ton	4.603,22	4.619,81	4.629,51	4.640,16	4.651,76	4.663,39	
		e. Kemiri	Ton	5.357,12	5.389,31	5.405,48	5.421,70	5.437,96	5.454,27	
		f. Cengkeh	Ton	1.185,11	1.185,58	1.186,06	1.186,65	1.187,36	1.188,08	
		g. Pala	Ton	238,21	240,84	242,52	244,46	246,66	248,88	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Unit	39	81	95	103	108	111	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	100	
				Persentasi Penanganan dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	100	100	100	100	100	100	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	%	80	80	85	85	90	90	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD, merupakan panduan bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Ende sertadapat menjadi acuan dari parapemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pertanian jangka menengah di Kabupaten Ende untuk periode tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pertanian ini juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Perangkat Daerah hingga 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Ende Periode 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende ini sangat bergantung pada kerja keras dan komitmen yang kuatdari seluruh jajaran aparatur pada Dinas Pertanian .Selain itu juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, lembaga/organisasi mitra dan pihak terkait lainnya.Denganbanyaknya *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor/instansi merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pencapaian berbagai target pembangunan pertanian di Kabupaten Ende.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan ini bukan merupakan sesuatu yang sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang baik merupakan hal yang sangat diperlukan terutama dalam aspek pelaksanaan dan evaluasi berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Strategis 2025-2029 ini dibuat, sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan semoga dapat menjadi acuan yang baik pula bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*)yang turut berkontribusi bagi keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Ende.Atas partisipasi dan dukungan semua pihak bagi penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan banyak terima kasih.


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Pertanian	